



**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM  
PEMENUHAN KEBUTUHAN LANSIA TERLANTAR**

(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh

**MARIAMA QAMARIAH**

**216.01.09.1075**



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2020**

## ABSTRAK

Mariama Qamariah, 2020 NPM 21601091075, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu ), Dosen Pembimbing I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si , Dosen Pembimbing II: Suyeno S.AP., M.AP

---

Pertumbuhan lanjut usia dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat. Negara mempunyai tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakatnya termasuk pada lanjut usia terlantar, oleh karena itu pemerintah sendiri sudah menyadari bahwa betapa pentingnya memberikan perhatian kepada lanjut usia dengan pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu, (2) faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu sudah baik, karena lansia terlantar sudah merasakan terbantu dengan program bantuan sosial yang diadakan Dinas Sosial Kota Batu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia terlantar yang berada di Kota Batu. (2) Faktor pendukung implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu adalah kerjasama yang dilakukan oleh para aparat pelaksana dengan berbagai instansi lain. Dukungan publik yaitu antusias dari masyarakat dan komitmen dari para aparat pelaksana. Faktor penghambat implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu adalah minimnya sumber daya manusia sehingga kekurangan terjadi yang membuat kurang maksimalnya kinerja dilapangan, alokasi anggaran yang masih sangat terbatas, dan tidak terpenuhinya fasilitas penunjang

**Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Sosial, Lansia Terlantar**

**Mariama Qamariah, 2020 NPM 21601091075, Public Administration Study Program Faculty Of Administration Of Islamic University Of Malang, Implementation Of Social Assistance Program In Fulfilling The Needs Of Elderly Displaced Persons (Studies On The Social Service Of Batu City), Mentor Lecturer I: Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Lecturer, Mentor II: Suyeno S. AP., M. AP**

---

The elderly growth of the year in number is increasing. The country has a responsibility in the welfare of the community including the elderly, therefore the government itself has realized how important it is to pay attention to the elderly with the provision of social assistance. Social assistance is intended to meet basic needs for elderly to be able to realize a reasonable level of living. This research aims to know (1) Implementation of social assistance programs in fulfilling the needs of elderly displaced in Batu social Office, (2) supporting factors and inhibitors of implementation of social assistance programs in fulfilling the needs of elderly displaced in the social service of Batu City.

This method of research is to use a qualitative approach and type of descriptive research. Qualitative descriptive research methods that are used to describe events and phenomena occurring in the field, on the collection of data is done by interview techniques, observations, and documentation. Researchers use trust, acquisition, dependency and certainty that aims to check the validity of the research data. The analysis of data on this research uses three components such as data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions.

The results of this study showed that (1) implementation of social assistance programs in fulfilling the needs of elderly citizens in Batu social service has been good, because the elderly have felt helped by the social Assistance Program held the social service of Batu City to improve the condition of neglected elderly welfare in Batu city. (2) The supporting factor implementation of social assistance program in fulfilling the needs of elderly displaced in Batu social Office is the cooperation conducted by the implementing officers with various other agencies. Public support is the enthusiasm of the community and the commitment of the implementing officers. The inhibitory factor implementation of social assistance programs in fulfilling the needs of elderly displaced persons in Batu social service is the lack of human resources so that deficiencies occur that make the maximum performance in the field, the allocation of budget is still very limited, and not fulfilled the supporting facilities

**Keywords: Implementation, Social Assistance, Elderly Displaced**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat disebutkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya hal tersebut, sehingga pembangunan Indonesia dapat ditentukan melalui kesejahteraan.

Kesejahteraan sendiri merupakan sesuatu yang didambakan oleh seluruh orang. Kesejahteraan yang dimaksud ialah kesejahteraan umum, yang dimana kesejahteraan tersebut tidak hanya menjadi sebuah tujuan suatu negara melainkan kesejahteraan juga wajib menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan juga memastikan rakyatnya berada dalam keadaan yang sejahtera.

Dengan kata lain kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang berada dalam keadaan makmur, sentosa dan juga merasa aman. Kesejahteraan sendiri bertujuan guna mencapai kehidupan yang tercapainya kehidupan pokok dan taraf hidup yang cukup tidak ada lagi masyarakat miskin, orang-orang kelaparan, pengangguran, anak putus sekolah atau bahkan tidak sekolah, juga lansia yang terlantar.

Permasalahan kesejahteraan sosial semakin beragam sehingga tidak terpenuhinya sebuah pelayanan kesejahteraan yang diberikan oleh sebuah pemerintah kepada rakyatnya. Dan mengakibatkan sebagian dari rakyat tidak menjalani kehidupan secara layak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial telah disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut pemaparan Dinas Sosial Kota Batu yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu kesulitan yang menghambat, atau gangguan dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat pula terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya secara memadai. Hambatan yang dimaksud dapat berupa kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterasingan. Perubahan lingkungan (secara mendadak) dan juga keterlantaran. Fenomena lansia terlantar merupakan salah satu diantara permasalahan sosial di Indonesia dan telah mendapatkan perhatian pemerintah yang kemudian dipayungi landasan yang kuat yang tertera di dalam Undang-undang RI No 13 Tahun 1998 Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Kesejahteraan lanjut usia yang dimana pemerintah bertugas membimbing, mengarahkan serta menciptakan suasana yang menjadi penunjang agar terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan sosial lanjut usia. Sebagian orang sering beranggapan bahwasanya implementasi hanya pelaksanaan dari apa yang

telah diputuskan dan disepakati oleh legislatif, seolah-olah tahapan penerapan ini dianggap kurang berpengaruh akan tetapi bila dilihat lagi bahwa sesempurna apapun rencana yang telah dibuat tidak akan ada gunanya apabila tidak dapat dilaksanakan dengan benar. Sehingga salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial adalah dengan diadakannya bantuan sosial yang dimana jaminan sosial dapat diartikan sebagai pemberian uang atau pelayanan sosial untuk melindungi seseorang dari tidak memiliki maupun kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, sakit, pengangguran, kecacatan, kematian, dan juga masa tua. Bentuk dari bantuan sosial sendiri tidaklah harus berbentuk uang yang harus diberikan namun dapat juga berupa barang atau jasa yang dimana adanya pelayanan sosial. Bantuan sosial suatu negara memiliki tanggung jawab sosial ekonomis kepada warga negaranya yang terbagi menjadi beberapa kelompok masyarakat rentan yang mengantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk lansia.

Dalam menjamin sebuah keberhasilan dan kesinambungan program bantuan kesejahteraan maka diperlukannya sebuah pedoman sebagai bahan acuan. Hal yang menunjukkan bahwa perlu adanya usaha dari pemerintah dalam menunjang sebuah kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan.

Lanjut usia sendiri merupakan perkembangan terakhir dari hidup manusia, yang dimana sebagian beranggapan bahwasannya perkembangan manusia akan berakhir setelah menjadi dewasa. Pada waktu manusia berkembang terdapat

beberapa perubahan yang ditandai dengan kondisinya yaitu tumbuhnya uban dan kulit yang mulai mengeriput.

Di Indonesia jumlah lansia pada tahun 1990 sendiri telah mencapai 11,4 juta kemudian pada tahun 2000 angka tersebut bertambah menjadi 22,2 juta yang dimana juga diproyeksikan pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 29 juta jiwa (Adib, 2008) dalam Nurul Sa'adah (2015:58).

Pertumbuhan lansia dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat, oleh karena itu pemerintah sendiri sebenarnya sudah menyadari bahwa betapa pentingnya memberikan perhatian kepada kehidupan lansia. Upaya yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia sendiripun sudah cukup baik dengan mengkoordinir dan mengadakannya posyandu-posyandu untuk lansia disetiap desa yang dimana posyandu tersebut memberikan sebuah pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu pemerintah sendiri juga menciptakan sebuah program yang dimana dengan diadakannya program tersebut dapat memenuhi taraf kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar agar para lansia dapat menikmati hidup yang tentram dan makmur yaitu dengan program bantuan sosial pembagian insentif dari program ini sendiri adalah dana yang dialokasikan pemerintah guna memberikan kesejahteraan bagi para lansia terlantar.

Pemerintah kota Batu telah mengeluarkan peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial merupakan anak panah pemerintah daerah Kota Batu dalam mengimplementasikan Undang-undang RI No 13 Tahun 1998 Pasal 7 dan Pasal 8

tentang Kesejahteraan lanjut Usia. Dinas Sosial Kota Batu sendiri mempunyai visi dan misi yakni Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan PMKS melalui pemberdayaan PMKS dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi PMKS meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial keluarga. Disamping itu dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan juga bermartabat, kemudian memenuhi hak atas segala kebutuhan dasar masyarakat maka pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dan juga pengembangan kesejahteraan sosial harus secara terarah, terencana dan berkelanjutan.

Dalam rangka penerapan kebijakan bantuan kesejahteraan bagi lansia yang tidak potensial ataupun yang telantar. Pemerintah kota Batu yaitu Dinas Sosial Kota Batu berupaya untuk mendukung pelaksanaan dalam penerapan kebijakan dengan memberikan bantuan per orang terhadap lansia berupa anggaran sebesar Rp. 500.000 per bulan yang mana dalam tahap pembagiannya 6 bulan sekali dalam setahun. Dari keterangan yang berikan pada bulan Agustus tahun 2019, ada 1.036 lansia dari tiga kecamatan di Kota Batu yang mendapatkan jaminan sosial.

Jumlah lansia yang tercatat dan menerima bantuan sosial pada 3 tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Lansia Penerima Bantuan Sosial 3 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Jumlah Lansia Penerima Bantuan Sosial |
|----|-------|---------------------------------------|
| 1. | 2017  | 175                                   |
| 2. | 2018  | 975                                   |
| 3. | 2019  | 1.036                                 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu, 2020

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Seksi pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia Dinas Sosial Kota Batu bahwasanya terjadi peningkatan sasaran bantuan sosial dalam tiga tahun terakhir. Dijelaskan pada tahun 2017 terdapat 175 lansia penerima bantuan sosial kemudian pada tahun 2018 terdapat 975 lansia penerima bantuan sosial serta 1.036 pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Yang Telah Dipaparkan, Maka Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu?
2. Apa Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Batu?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian atau riset pada umumnya mempunyai tujuan untuk menemukan, mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, demikian juga dengan penelitian yang akan disajikan dalam skripsi ini juga mempunyai tujuan yang dimana untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pengimplementasian

program bantuan jaminan sosial dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan lansia terlantar dan juga mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi bantuan sosial bagi lansia terlantar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pembaca dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan topik sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah pemaparan dan menganalisis implementasi bantuan sosial dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan lansia terlantar dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pihak terkait Dinas Sosial Kota Batu. Selain dari pada itu, penelitian ini dapat juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat sebuah program dan juga kebijakan yang memang sekiranya diharapkan oleh masyarakat di Kota Batu khususnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pemabahsan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti terkait implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu dapat dikatakan sudah cukup baik. Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh dinas sosial kota Batu sudah membantu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia terlantar yang berada di Kota Batu walaupun belum mampu untuk mengcover secara keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana diukur dengan indikator yang digunakan dalam proses pengimplementasian baik dari karakteristik masalah, kebijakan maupun karakteristik lingkungan. Yang dimana masing-masing indikator ini menunjukkan sebagian besar sudah sesuai dengan sasaran kebijakan dari bantuan sosial ini.

Proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada dinas sosial Kota Batu sendiri senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Yang dimana faktor pendukung dalam pelaksanaannya program bantuan sosial ini meliputi intregasi antar pelaksana, banyaknya dukungan publik, sikap/komitmen dari aparat pelaksana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia

terlantar pada dinas sosial Kota Batu adalah keterbatasannya sumber daya manusia sebagai pelaksana , keterbatasan alokasi anggaran yang menyebabkan tidak dapat mengcover seluruh lansia terlantar yang berada di kota Batu, juga keterbatasan fasilitas seperti rumah singgah sementara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam mewujudkan rangka untuk mengoptimalkan Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu, maka ada beberapa saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah aparat pelaksana baik staff di seksi Rehabilitasi pelayanan sosial anak dan lanjut usia juga pada Pekerja Sosial Masyarakat perlu diberikan pemberian intensif dan juga semacam diklat untuk pelatihan dalam meningkatkan kualitas Pekerja Sosial Masyarakat dalam kegiatan mendampingi lansia terlantar.
2. Pelaksanaan sosialisasi harus disampaikan langsung kepada masyarakat yang berada di lingkungan kebijakan program bantuan tersebut tidak hanya melalui lurah/desa setempat, setidaknya adanya pendampingan dari Dinas Sosial Kota Batu
3. Dinas Sosial Kota Batu perlu menjalin kerjasama dengan lembaga sosial masyarakat (LSM) juga dengan organisasi sosial masyarakat yang memperhatikan permasalahan kesejahteraan dari lansia yang terlantar di Kota Batu agar dapat memberikan masukan dalam perbaikan isi kebijakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial di Kota Batu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Adi, Isbadi, Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.

FISIP UI PRESS

Dr. Joko Widodo, M.S. 2018. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*

*Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Sepuluh. Malang, Media Nusa Creative

Edi Suharto. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung,

Alfabeta.

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung, Refika Aditama

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Joze Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan*

*Keunggulannya*. Jakarta. PT. Grasindo

Moleong, L.J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja

Rosdakarya

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2002. *Analisis Data Kualitatif*

Nugroho, Wahyudi 2008. *Keperawatan Gerontik dan Geriatrik*, Jakarta, Buku

Kedokteran EGC

Pujileksono,Sugeng. 2016. *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Perspektif Pemenuhan Keadilan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.*

Malang, Setara Press

Solochin Abdul, Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke*

*Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono, 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung,

Alfabeta

Sugiyono,2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung,

Alfabeta

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus.*

Yogyakarta, Center of Academic Publishing Service

#### **Sumber Jurnal dan Skripsi**

Arsiyah, Ramadhani. 2015. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia*

*Di Kabupaten Sidorjo.* Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 3 Nomor 2, Halaman 201.

Barjo Wahyu Hidayat, M Hendri Nuryadi. 2019. *Implementasi Program Keluarga*

*Harapan Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Warga Lansia Miskin (Studi*

*Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta).* Jurnal PKn Progresif. Volume 14

Nomor 1, Halaman 17.

Fakhmi Umar. 2017. *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut*

*Usia (Lansia) Terlantar di Kota Bandar Lampung.* Fakultas Ilmu

*Pemerintahan.* Universitas Lampung

- Hikmah Wati. 2016. Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung. Fakultas Hukum. Universitas Lampung
- Istiqomah. 2017. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Lansia Dengan Demensia di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang. Fakultas Kedokteran. Universitas Diponegoro
- Mona Siliany. 2015. *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Jurnal Katalogis. Volume 3 Nomor 5, Halaman 77-85.*
- Mulia Astuti ,2015. *Implementasi Kebijakan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar. SOSIO KONSEPSIAL. Volume 4 Nomor 1, Halaman 215-235.*
- M. Nur. Ihsan. 2017. Implementasi Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung
- Nurus Sa'adah. 2015. *Menata Kehidupan Lansia Suatu Langkah Responsif Untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Lansia Desa Mojoleg Imogiri Bantul Yogyakarta). Volume 9 Nomor 2, Halaman 58.*
- Nuraeni Setyaningrum. 2012. Upaya Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lansia Melalui Home Care Service di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budhi Luhur. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta

Rangkoly, Ivo. 2014. *Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 2 Nomor 3, Halaman 4.

### **Dokumen**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Wali Kota Batu Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu